

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Visi pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan Visi Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dijelaskan kedalam Misi Pendidikan Nasional, yaitu (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global (5) membudidayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Betapa pentingnya pendidikan di dalam Peningkatan kualitas suatu bangsa yang mandiri telah diakui sejak perumusan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan undang-undang ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Salah satu realitas krusial dalam pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah Pulau Sabutung adalah sarana dan prasarana yang saat ini masih sangat minim baik disekolah maupun di lingkungan masyarakat, Dengan demikian, masalah pokok bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapat layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan pendidikan. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan biaya lainnya. Selain itu, mutu pendidikan

jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, belum sepenuhnya terpantau dan terjamin dengan baik. Pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah kabupaten pangkep khususnya Pulau Sabutung, dengan melihat kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi daratan yang memerlukan penanganan dan strategi tersendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang ini sebaiknya mempunyai strategi yang bisa mengangkat dan menjadikan sektor pendidikan di wilayah Pulau Sabutung setara dan mampu bersaing dengan wilayah daratan yang ada di kabupaten Pangkep. Salah satu isu krusial pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah kepulauan adalah penguasaan pengetahuan yang saat ini masih rendah, yang diindikasikan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang tercermin dalam rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Beberapa tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini diwilayah kepulauan, khususnya pada bidang pendidikan cukup memperhatikan. Dengan demikian, masalah pokok bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapat layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan ketentuan wajib belajar. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan biaya lainnya. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, belum sepenuhnya terpantau dan terjamin dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masa kini, pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan disekitar lingkungannya, semua orang pasti menginginkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia, karena pendidikan yang layak serta merata merupakan agenda penting dalam program pencerdasan dan pembangunan bangsa dan negara, bisa dibayangkan apabila sebuah negara tidak dilandaskan dengan pendidikan, tidak sadar akan pentingnya sebuah pendidikan dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pasti tentu negara itu akan menjadi Negara dan bangsa yang tertindas ditengah menderanya masalah global yang akhir-akhir ini terjadi.

Dengan kondisi seperti itu diharapkan pemerintah daerah lebih sensitif untuk membangun dunia pendidikan di Pulau Sabutung dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan melihat kondisi geografis, standar jumlah siswa, jumlah guru. Sehingga pembangunan sekolah itu tidak hanya gedungnya yang megah, akan tetapi standar kelulusan dan prestasi siswa dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lebih besar dan tidak lagi memerlukan biaya besar demi untuk mengenyam pendidikan di daratan.

Studi yang dilakukan ini merupakan upaya untuk mengaji beberapa aspek implementasi strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional di daerah kepulauan Sabutung (Pangkep), terutama dalam aspek kelayakan mutu tenaga

pendidik dan penyelenggaraan pendidikan. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat terutama tentang strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pulau Sabutung Kabupaten Pangkep.

Dalam tinjauan ilmu Pemerintah, pengembangan suatu sektor akan sangat tergantung pada strategi yang ditempuh oleh pemerintah dengan demikian untuk menangani pendidikan pada daerah kepulauan di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep akan sangat tergantung pula terhadap bagaimana pemerintah daerah menciptakan strategi yang tepat. Dalam hal ini membangun dan mengembangkan pendidikan pada daerah Pulau Sabutung dengan keseriusan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dan kemudian akan diteliti secara ilmiah terkait permasalahan pendidikan pada daerah kepulauan dengan judul: **”Strategi Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pendidikan di pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam peningkatan kualitas pendidikan pada daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep?

- b. Strategi yang digunakan dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan diatas maka Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pemetaan kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep
- b. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam peningkatan kualitas pendidikan daerah pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini selain menambah pengalaman peneliti di lapangan, juga dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan, khususnya tentang strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pendidikan pada daerah terpencil dan kepulauan dalam rangka mewujudkan insan akademis yang ceras dan berprestasi yang luas.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dimaksud adalah agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi para praktisi yang bergerak di bidang perumusan strategi peningkatan kualitas wilayah, khususnya meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah terpencil dan Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratus* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 perspektif yang berbeda yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Strategi adalah suatu rencana jangka panjang dan sebagai penentu tujuan jangka panjang, yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Strategi berguna untuk mengarahkan suatu organisasi mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian ini strategi adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal*. (David, dalam Sanjaya, 2008:2). Dengan demikian strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi merupakan siasat dalam pembelajaran. Tujuan

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien manakala dijalankan dengan suatu strategi tertentu

Pengertian strategi yang lebih tajam dikemukakan oleh Christensen Andrews, Van Bower (dalam Salusu, 2002 yang menegaskan bahwa pengertian strategi sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut yang kemudian akan melahirkan kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembahasan tentang strategi, kelihatan bahwa factor lingkungan telah dipandang sebagai factor yang memainkan peranan penting dalam menjalankan organisasi tanpa mengingkari hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri (Salusu 2002).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi serta menetapkan tujuan. Sebuah lembaga/organisasi tentunya harus mengetahui problematika lembaganya, mengetahui kekuatan, kelemahan peluang maupun ancaman sehingga bisa melahirkan solusi-solusi atau strategi-strategi cemerlang dan bisa mengantarkan lembaga/organisasinya pada kedudukan yang sangat berpengaruh dalam pengulatan kelembagaan bangsa maupun dunia.

Dokumen Renstra Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda (Dispora) Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan ini merupakan renstra SKPD yang disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Pangkep untuk Priode 2011-2015

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan ini di susun dengan mempedomani Peraturan Menteri dalam negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategi yang dibentuk oleh tim revisi rencana strategi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep.

Kondisi pelayanan yang diharapkan dan diproyeksikan 5 tahun kedepan. Kondisi pelayanan pendidikan masa kini memaparkan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) dibidang pendidikan adapun rencana strategi pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan adalah sabagai berikut: (1) Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. (2) Memberikan Tunjangan Khusus bagi guru.(3) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.(4) Pemerataan rasio guru dan siswa.

Adapun rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas / Mutu Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan
4. Meningkatkan Manajemen Pembinaan Generasi Muda

Mengukur tingkat keberhasilan, kekuatan dan kelemahan dalam manajemen strategi, maka analisis SWOT merupakan salah satu alternative

yang digunakan dalam menganalisis suatu lembaga/organisasi. Teknik ini dibuat oleh Fred R. David (2006). Analisis SWOT itu sendiri dapat di definisikan dengan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Ada beberapa tahapan dan langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan analisis SWOT antara lain: langkah *pertama*, identifikasi kelemahan (*internal*) dan ancaman (*eksternal, globalisasi*). Yang paling urgen untuk diatasi secara umum pada semua komponen organisasi. Langkah kedua, identifikasi kekuatan (*internal*) dan peluang (*eksternal*) yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Langkah ketiga, lakukan analisis SWOT lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam konteks system manajemen organisasi. Langkah keempat, rumusan strategi-strategi yang direkomendasi untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan program penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan disusun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan.

Analisis SWOT tersebut diharapkan suatu lembaga/organisasi termasuk lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis.

Strategis adalah suatu cara dimana organisasi atau suatu lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Kemudian melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenghts*)

Faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah kompetensi khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan tersebut. Hal ini bisa dilihat jika sebuah lembaga pendidikan harus memiliki *skill* atau keterampilan yang bisa disalurkan bagi peserta didik, lulusan terbaik/hasil andalan, maupun kelebihan-kelebihan lain yang membuatnya unggul bagi pesaing-pesaing serta dapat memuaskan *steakholder* maupun pelanggan (peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa).

Sebagai contoh bidang keunggulan, antara lain kekuatan pada sumber keuangan, citra yang positif, keunggulan kedudukan di masyarakat. Loyalitas pengguna dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan sedangkan keunggulan lembaga pendidikan di era otonomi pendidikan antara lain ; sumber daya manusia yang secara kuantitatif besar, hanya saja perlu pembenahan dari kualitas. Selain itu *antusiasme* pelaksanaan pendidikan sangat tinggi yang didukung sarana prasarana pendidikan adalah kebutuhan masyarakat terhadap yang bersifat

transcendental sangat tinggi, dan itu sangat mungkin diharapkan dari proses lembaga pendidikan.

Bagi sebuah lembaga pendidikan sangat penting untuk mengenali terhadap kekuatan dasar lembaga tersebut sebagai langkah awal atau tonggak menuju pendidikan yang berbasis kualitas tinggi. Mengenali kekuatan dan terus melakukan releksasi adalah sebuah langkah besar untuk menuju kemajuan bagi lembaga pendidikan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Segala sesuatu pasti memiliki kelemahan adalah hal yang wajar tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Kelemahan ini bisa kelemahan dalam sarana dan prasarana, kualitas atau kemampuan tenaga pendidik, Memberikan tunjangan khusus guru Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, Pemerataan rasio guru dan lemahnya kepercayaan masyarakat tidak sesuai antara hasil kelulusan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia usaha dan industri dan lain-lain.

Untuk itu beberapa faktor kelemahan yang harus segera dibenahi oleh para pengelola lembaga pendidikan antara lain; (1) Lemahnya dalam lembaga pendidikan. (2) sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib saja. (3) Lembaga pendidikan swasta umumnya kurang bisa menangkap peluang. Sehingga mereka hanya puas dengan

keadaan yang dihadapi sekarang ini. (4) *output* lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan *output* lembaga pendidikan yang lain dan sebaliknya

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah sesuatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan formulasi lingkungan tersebut misalnya: (1) kecenderungan penting yang terjadi dikalangan peserta didik. (2) ventifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian. (3) perubahan dalam keadaan persaingan.(4) hubungan dengan pengguna atau pelanggan dan sebagainya.

Peluang pengembangan lembaga pendidikan antara lain :

1. Di era yang sedang krisis moral dan krisis kejujuran seperti ini diperlukan peran serta pendidikan agama islam yang lebih dominan.
2. Pada kehidupan masyarakat kota dan modern yang cenderung konsumtif dan hedonis, membutuhkan petunjuk jiwa, sehingga kajian-kajian agama berdimensi sufistik kian menjamur. Ini menjadi salah satu peluang bagi pengembang lembaga pendidikan kedepan.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang, ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi maju dan perannya.

Sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh ancaman tersebut adalah minat peserta didik baru yang menurun, kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut dan lain-lain.

B. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan kota.

Menurut UUD 1945 Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Definisi Pemerintah Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintah daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintah.

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Adapun urusan Asas Pemerintah daerah khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a) Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

b) Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

c) Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintah, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

3. Tugas Pemerintah Daerah

Tugas pemerintah adalah Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (*regelling*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (*bestuur*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

C. Konsep Peningkatan Kualitas

Istilah peningkatan kualitas lebih sering digunakan untuk menggambarkan dan memberi makna perubahan kearah positif dan lebih maju dibandingkan keadaan semula. Dalam konteks bahasa Inggris kata peningkatan kualitas selaras dengan kata *development* yang berasal dari kata kerja *to develop*, yang artinya menubuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara bertahap (*to change gradually*). Dengan demikian, peningkatan kualitas bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (dalam Suharto; 2012).

Menurut Tadaro dalam Suharto,(2012) Peningkatan kualitas tidak bisa dipisahkan oleh global, peningkatan kualitas tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi pada konteks nasional, ia dipengaruhi pula oleh perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional. Berdasarkan pandangan tersebut, selanjutnya Todaro dalam Suharto, 2012 mengemukakan bahwa sedikitnya peningkatan kualitas harus memiliki tiga tujuan yang sering berkaitan satu sama lain yaitu: meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang.

D. Konsep Kualiatas Pendidikan

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang

berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat. Kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. (Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, 2008).

Menurut Tjiptono dan Diana, 2003 Keberhasilan suatu jasa pelayanan dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada konsumennya, dalam arti perusahaan memberikan layanan yang bermutu kepada para pelanggannya akan sukses dalam mencapai tujuannya. Sekarang ini mutu pelayanan telah menjadi perhatian utama dalam memenangkan persaingan. Mutu pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi lembaga untuk menciptakan kepuasan konsumen. Suatu pendidikan bermutu tergantung pada tujuan dan yang akan dilakukan dalam pendidikan. Definisi pendidikan bermutu harus mengakui bahwa pendidikan apapun termasuk dalam suatu sistem. Mutu dalam beberapa bagian dari sistem mungkin baik, tetapi mutu kurang baik yang ada di bagian lain dari sistem, yang menyebabkan berkurangnya mutu pendidikan secara keseluruhan dari pendidikan. Definisi mutu layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan

pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut Parasuraman terdapat lima dimensi kualitas pelayanan (*serqual*), yaitu: (1) dimensi berwujud (*tangibles*), untuk mengukur penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan sarana komunikasi; (2) dimensi keandalan (*reliability*), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan; (3) dimensi daya tanggap (*responsiveness*), menunjukkan kesediaan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan cepat; (4) dimensi jaminan (*assurance*), untuk mengukur kemampuan dan keramahan karyawan serta sifat dapat dipercaya; dan (5) dimensi empati (*emphaty*), untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap kebutuhan pelanggan serta perhatian yang diberikan oleh karyawan (Shahin, 2009).

E. Konsep Pelayanan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/kota.

UU.No 15 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi : pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 dan D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

F. Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17).

Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (*Intangible*). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki dan pelanggan yang lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Napitupulu (2007:164)

Menurut Kolter (2002:82) Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, Produksinya dapat dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

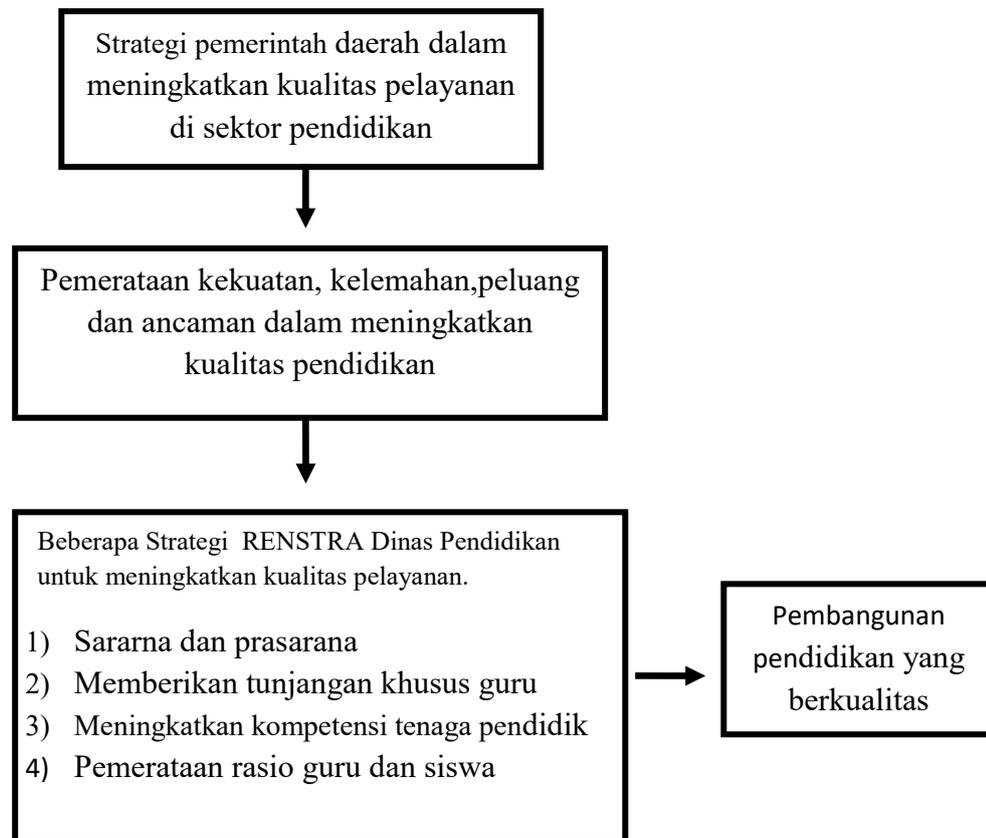
Begitu pula yang dikemukakan Tjiptono (2002), bahwa pelayanan yang berhasil guna dalam suatu organisasi adalah bahwa pelayanan yang diberikan oleh anggota organisasi tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggannya. Sebagai tolak ukur adalah tidak adanya atau kurangnya keluhan dari masyarakat /konsumen. Sedangkan pelayanan umum yang berhasil guna ditandai dengan tidak adanya calo-calo. Pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/ inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsi sangat baik van berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi baik itu pemerintah maupun oleh swasta

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini dilakukan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali melalui kolektif. Definsi pelayanan publik lainnya di ungkapkan oleh Sadu Wasistiono dalam buku Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah, sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat” (Wisistiono, 2001:53).

G. Kerangka fikir

Penelitian ini melihat strategi atau upaya pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan pendidikan di Kabupaten Pangkep khususnya di daerah pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring yang dimana pelayanan pendidikan yang kurang maka pemerintah melakukan pemerataan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam meningkatkan kualitas maka perlu ada strategi pemerintah. Adapun kerangka fikirnya di gambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir

H. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah kepulauan diantaranya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta meningkatkan dan kualitas program pendidikan, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan mengembangkan keseimbangan rasio guru dan siswa.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka fikir tersebut, penulis dapat mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

- a) Pemerataan Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud adalah untuk memudahkan dalam melihat kondisi ril lapangan.
- b) Memberikan tunjangan khusus guru adalah meningkatkan kesejahteraan guru di daerah kepulauan melalui gaji yang layak.
- c) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas guru dalam memberikan pendidikan keterampilan dan pelatihan-pelatihan seperti diklat dan lain-lain.
- d) Pemerataan rasio guru dan siswa yang dimaksud adalah keseimbangan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik dengan jumlah siswa.
- e) Meningkatkan angka partisipasi sekolah yang dimaksud adalah indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan di mulai 4 Maret – 4 Mei. Adapun Lokasi penelitian ini berlokasi di Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut adalah rendahnya tingkat kualitas Pendidikan di pulau Sabutung.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sektor pendidikan di pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

2. Tipe penelitian

Tipe yang di gunakan oleh penulis adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, observasi dan dokumentasi yaitu kepada orang-orang

yang mengetahui lebih mendalam tentang topik penelitian secara akurat dan mampu mewakili kelompok dalam membahas kegiatan pendidikan di pulau Sabutung

2. Data sekunder yaitu Data yang diperoleh langsung dari tulisan, dokumen, jurnal, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Informan Penelitian

Adapun informan-informan dari penelitian tersebut adalah orang yang dianggap mampu memberikan data-data atau informasi terkait permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Drs.H.Mohammad Ridwan, M.pd	MR	Kepala dinas pendidikan Kabupaten Pangkep	1 orang
2.	Abd. Hayyi, S.Pd, S.H	AH	Kepala Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabiring Utara	1 orang
3.	Faisal Hamja, S.Pd	FH	Guru Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabiring Utara	1 orang
4.	Sitti Asia	SA	Orang Tua Siswa	1 orang
5.	Wilda lestari	WL	Siswa SMP Neg 1 Liukang Tupabiring Utara	1 orang
Total Informan				5 orang

E. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti guna

melengkapi data primer. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya Strategi pemerintah pulau dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pendidikan dipulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan Tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna melengkapi informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan penulis dengan kepala desa dan masyarakat dilokasi dimana penulis meneliti, sehingga data yang diperoleh penulis merupakan hasil wawancara vari berbagai sumber.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telah pustaka, diaman dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah,jurnal, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Mengelolah atau menganalisis data adalah usaha kongkrit untuk membuat data, sebab besar jumlahnya data, tinggi nilai data yang terkumpul

sebagai hasil pelaksanaan pengumpulan data apabila tidak disusun dalam suatu sistematis yang baik niscaya data itu merupakan bahan yang bisu belaka. Oleh karena itu penelitian menggunakan ragam penelitian kualitatif, maka analisa data dilakukan pada waktu melakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai. Kemudian data tersebut akan dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh (Sugiyono, 2007:55).

Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data adalah mencatat semua data secara obyektif dan adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, *cart*, atau garfis, sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering

muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

G. Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiono (2011:273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.
2. Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kreabilitas dapat dilakukan vengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Karakteristik Objek Penelitian

1. Letak dan Luas

Pulau Sabutung berada pada koordinat geografis $-4, 7500$ $119,4328$ $4^{\circ} 45' 0.000''$ Lintang Selatan $119^{\circ} 25' 58.000''$ secara administrasi berada di provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkajene, Kecamatan Tupabiring Utara dengan Desa Matiro Kanja, luas Pulau $\pm 2 \text{ km}^2$, dengan batas wilayah: Sebelah Utara Desa Matiro Bombang atau Pulau Salemo
Sebelah Selatan Desa Matiro Ulung atau Pulau Kalambing
Sebelah Barat Desa matiro walie atau Pulau Samatellu
Sebelah Timur Desa Matiro Baji atau Pulau Saugi.

2. Topografi

Keadaan topografi Pulau Sabutung merupakan daratan dengan hutan dan semak belukar pada bagian tengah pulau. Pulau Sabutung terbentuk dari sedimen atau pengendapan material dasar laut yang akhir membentuk karang dan timbul kepermukaan hingga menjadi sebuah daratan. Kemiringan lereng pada Pulau Sabutung sekitar 0-3% dengan morfologi pantai pesisir.

Pulau Sabutung merupakan salah satu pulau yang masuk dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Pangkajene sesuai dengan surat keputusan Bupati Pangkajene Nomor 180 Tahun 2009. Status kepemilikan Pulau Sabutung yaitu memiliki masyarakat dan pulau ini dikelola dengan baik.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Pulau Sabutung 1304 jiwa yang terdiri dari 344 Kepala Keluarga. Untuk presentase penduduk Laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan sekitar 58%. Penduduk Laki-laki berjumlah 755 jiwa dan penduduk perempuan 549.

Di Pulau Sabutung ada beberapa macam mata pencaharian penduduk. Untuk PNS/TNI/POLRI hanya sekitar 5%, 5% pula sebagian pedangang, ada yang sebagai Nelayan Budidaya sekitar 10% dan sisanya 80% sebagai Nelayan Tangkap. Rata-rata penduduk Pulau Sabutung memang bermata pencaharian sebagai Nelayan Tangkap.

b. Pendidikan

Sarana pendidikan di Pulau Sabutung terdapat PAUD (pendidikan anak usia dini) yang di dirikan dari PNPM Mandiri, SD, SMP, dan SMA (SMU Negeri Liukang Tupabiring)

B. Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kepulauan Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

Tabel 1.2 Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

Faktor Internal Faktor Eksternal	STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSE (Kelemahan)
		1. Adanya pelatihan diklat Bagi tenaga pendidik 2. Pembenahan ruang kelas baru
OPPORTUNITES (Peluang)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Adanya pendidikan gratis 2. Program pemerintah wajib belajar 12 Tahun	1. Adanya bantuan dana, sehingga dapat menambah fasilitas sarana dan prasarana untuk mencapai jumlah anak didik yang bertambah dari tahun ketahun. 2. Adanya tunjangan khusus guru yang dapat memenuhi kesejahteraan guru 3. Pelatihan (diklat) bagi tenaga pengajar dapat meningkatkan kualitas guru	1. Kondisi geografis yang kurang memadai bisa diatasi program pemerintah dalam peningkatan pendidikan. 2. Adanya program pendidikan gratis menjadi solusi terhadap masalah keterbatasan dana.
THREATS (Ancaman)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Kurangnya pengawasan yang dapat menyebabkan penyelewengan dana dalam pelaksanaan strategi tersebut 2. Kurangnya minat guru untuk mengajar di kepulauan	1. Kebijakan pemerintah dalam menegaskan pelayanan pemerintah untuk lebih baik dalam pendidikan. 2. Keseimbangan rasio guru dan siswa	1. Memperbaiki tingkat pelayanan dan SM guru-guru kepulauan 2. Mengeektikan penyaluran perasarana dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu

Sumber : Data Skunder, 22 Maret 2017

Dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Strengths (*Kekuatan*)

a. Adanya pelatihan diklat bagi tenaga pendidik

Adanya pelatihan diklat bagi tenaga pendidik maka pemerintah berupaya untuk mencapai peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sebagian tenaga kependidikan, maka profesi guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran, keterampilan merencanakan dan melakukan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan.

“Pendidikan dan pelatihan itu memang sangat perlu bagi tenaga pendidik agar dapat mengupayakan proses belajar yang baik dan sesuai kurikulum berlaku dan kami sudah pernah mengikutkan beberapa guru dalam pelatihan tersebut. Namun masih ada beberapa guru yang belum mengikuti pelatihan tersebut.karena pada saat pelatihan hanya guru-guru yang kebetulan ke Kabupaten kota untuk menerima gajinya itulah yang kami ikutkan dalam pelatihan tersebut karena kalau kita hadirkan juga guru-guru yang sementara ada di pulau mengajar itu sulit untuk hadir di karenakan sulitnya komunikasi dan transportasi’’. (Hasil wawancara MR, 22 Maret 2017)

Berdasarkan hasil Wawancara dilapangan terdapat sesuatu kekeliruan bagi pemerintah atau pihak terkait yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Sehingga hanya sebagaian

kecil guru yang berasal dari daerah Pulau Sabutung khususnya guru SMP Neg. 1 Liukang Tupabiring yang bisa mengikuti diklat tersebut karena pada dasarnya para guru-guru yang ada di daerah terpencil dan kepulauan khususnya di Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep di SMP 1 Liukang Tupabiring di dominasi oleh guru honor. Senada dengan penjelasan tersebut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang guru SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang menyatakan bahwa:

“Sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan, tapi belum semua adapun pelatihan yang kami ikuti ialah seminar dan lokakarya, adapun manfaat dalam mengikuti pelatihan tersebut adalah peningkatan keahlian kerja, pengurangan keterlambatan kerja peningkatan dalam rasa tanggung jawab”. (Hasil Wawancara FH, 22 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi tenaga pengajar dalam upaya meningkatkan kualitasnya karena dalam menyalurkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki seorang guru dibutuhkan juga berbagai pengalaman dan keterampilan seorang pengajar sehingga dalam proses pengajaran para siswa juga mampu menyerap dan memahami dengan mudah dan cepat. Dengan adanya seminar dan lokakarya yang diikuti para tenaga pendidik berungsi untuk pengembangan kerja, tanggung jawab, tata pengaturan kerja dan pengambilan keputusan dalam kerja. Berikut hasil wawancara siswa SMP Negeri 1 Liukang Tupabiring Utara yang mengatakan bahwa:

“Terkadang ada guru yang mudah dan cepat dipahami bila menjelaskan. Namun terkadang pula ada guru yang perlu menjelaskan berulang-ulang baru bisa dipahami itulah ungkapan anak kami dalam proses belajar

mengajarnya ini dikarenakan kurangnya pelatihan-pelatihan guru di Pulau Sabutung.” (Hasil wawancara WL, 22 Maret 2017)

Peran guru sangat penting dalam proses belajar mengajar serta dalam memajukan dunia pendidikan. Kualitas siswa/anak didik dan dunia pendidikan sangat tergantung pada mutu guru. Karena itu guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang baik. Proses belajar mengajar di ruangan kelas merupakan kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik sangat menentukan hasil yang dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, selain penguasaan ilmu pengetahuan oleh seorang guru, keterampilan dan teknik penyampaian juga sangat berpengaruh. Dalam hal ini peningkatan kualitas guru dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Dengan demikian kualitas dan prestasi siswa juga dapat meningkat dan memiliki daya saing dalam berkompetensi dengan siswa dan sekolah-sekolah lain. Berikut hasil wawancara Orang Tua Siswa SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pelatihan untuk para guru pengajar sangat membantu agar para guru lebih kompetensi dalam mengelola peserta didik baik dalam mengajar maupun melatih anak-anak kami”. (Hasil wawancara dengan SA, 23 Maret 2017)

Tabel 1.3 Nama-Nama tenaga pendidik yang pernah ikut pelatihan diklat disekolah SMP NEG 1 Liukang Tupabiring Utara.

NO.	Nama	Jenis diklat	Judul Seminar
1.	Abd. Hayyi, S.Pd, S.H	Seminar	Diklat pengembangan kurikulum SMP Perikanan
2.	Hamsi, S.Pd.I	Seminar	Diklat pengembangan kurikulum SMP Perikanan
3.	Musakkir, S.Pd	Lokakarya	Paradigma mengajar dan manajemen kelas
4.	Lisnawati, S.Pd	Lokakarya	Paradigma mengajar dan manajemen kelas
5.	ST. Halija, S.Pd	Seminar	Diklat pengembangan kurikulum SMP Perikanan
6.	Faisal Hamja, SP. D	Lokakarya	Paradigma mengajar dan manajemen

b. Pembenahan ruang kelas baru

Dalam pembenahan atau pemeliharaan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan, mempertahankan dan mengembalikan fasilitas dalam kondisi yang baik dan tetap berfungsi. Pemeliharaan adalah upaya untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini. Dengan demikian peralatan yang dengan baik akan mudah untuk dipakai dan dapat menghemat biaya pembelian barang baru. Pemeliharaan peralatan dan fasilitas sekolah yang lainnya memang perlu dilakukan oleh setiap sekolah. Fasilitas yang selalu terawat dengan baik akan membuat pekerjaan berjalan dengan baik akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Pekerjaan yang berjalan tanpa adanya kendala dibidang peralatan atau fasilitas lain tersebut akan mengefektikan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

“Pembenahan ruang kelas memang sangat perlu dalam pengembangan sekolah kami kedepannya, tapi yang sangat urgen dalam pembenahan ini adalah pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik dan tetap berfungsi”.
(Hasil wawancara dengan AH, 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembenahan ruang kelas baru memang sangat perlu dan perawatan prasarana yang sudah ada harus dirawat agar proses belajar mengajar dengan adanya pemeliharaan maka pembenahan kelas tidak terlalu membutuhkan banyak biaya.

2. *Weaknesse* (kelemahan)

a. Kondisi geografis yang terisolir dari kota

Letak geografis Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten maka proses penyaluran bantuan dari kota

tidak cepat tersalurkan. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Liukang Tupabiring meliputi keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah dan sumber daya manusiannya karena letak geografis Kecamatan Liukang Tupabiring utara yang jauh dari Kabupaten sehingga proses penyaluran kualitas pendidikan tersalurkan secara bertahap. Berikut hasil wawancara Kepala Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Kondisi sekolah kami yang jauh dari ibu kota Kabupaten, karena letak geografis sehingga mutu pendidikan kami belum sebanding dengan pendidikan yang ada di kota dikarenakan kurangnya fasilitas berupa komunikasi, transportasi yang memadai penghambat untuk menyamakan pendidikan yang ada dikota.”(Hasil Wawancara AH, 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa letak geografis yang jauh dari kabupaten kota sehingga pendidikan tidak dapat menyamai tingkat pendidikan yang ada di kota, akan tetapi dengan letak geografis yang jauh masyarakat dan pemerintah kepulauan mengupayakan agar mutu pendidikan di upayakan sampai walau tidak maksimal. Berikut hasil wawancara Orang Tua Siswa SMP Neg 1 Lukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Letak geografis yang menjadi masalah sehingga penyaluran bantuan agak sulit makanya pendidikan di sekolah masih kurang fasilitas-fasilitas, semoga pemerintah bias lebih memperhatikan lagi.”(Hasil wawancara SA, 23 Maret)

b. Dana untuk peningkatan mutu pendidikan yang terbatas.

Banyak hal yang terjadi dalam persoalan kurangnya dana dalam pendidikan khususnya bagi orang tua, karena menurut mereka pendidikan anak bisa jadi merupakan persoalan yang paling penting dalam kehidupan mereka. Tak jarang

orang tua rela berkorban demi pendidikan yang layak dan baik bagi anak-anak. Dan kendala yang dihadapi orang tua, dari generasi ke generasi, tahun ke tahun yang menjadi tantangan bagi orang tua adalah tentang dana atau uang pendidikan. Tapi dengan adanya bantuan berupa pendidikan gratis maka dana yang terbatas dapat diatasi untuk menyekolakan anak-anak mereka. Berikut hasil wawancara Guru SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan:

“Dana yang kurang dalam pendidikan sangat menghambat proses perkembangan pendidikan di daerah di kepulauan khususnya Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring dimana kondisi geografisnya lumayan jauh dari ibu kota sehingga kalau dana yang kurang dan terbatas akan berdampak negative dalam pengembangan kualitas pendidikan yang bermutu seperti pendidikan dikota”. (Hasil Wawancara FH, 23 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara diatas tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kekurangan dana sangat berdampak dalam pengembangan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan khususnya Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep, di tambah kondisi geografis yang jauh dari ibu kota Kabupaten. jadi kondisi yang seperti ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan wilayah kepulauan yang terletak jauh dari ibu kota Kabupaten. Berikut Hasil wawancara Siswa SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Di sekolah kami masih kekurangan fasilitas – fasilitas di karenakan masalah dana yang terbatas dari pemerintah jadi kami sebagai siswa cukup tidak nyaman di dalam proses belajar.”(Hasil wawancara WL, 24 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara diatas tersebut dapat dikatakan bahwa kekurangan dana sangat berpengaruh kepada fasilitas – fasilitas yang ada di sekolah seperti ini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi. Berikut Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Kekurangan dana untuk wilayah khususnya kepulauan Sabutung di karenakan kondisi yang lumayan jauh di jangkau makanya penyaluran bantuan agak terhendak sehingga fasilitas – fasilitas sekolah masih kekurangan.”(Hasil wawancara MR, 24 Maret 2017).

3. *Opportunities* (Peluang)

a. Adanya pendidikan gratis

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga Negara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA, dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun pada tingkat pendidikan lanjutan ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan berbagai pengutan. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi iuran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyelenggaraan ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang tinggi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan

pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia berkualitas. Berikut Hasil wawancara Orang Tua siswa yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pendidikan gratis kami bisa melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA sekolah menengah atas, program pendidikan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan khususnya kami sebagai orang tua karena dapat mengurangi beban biaya kami dalam sehari-harinya”. (Hasil wawancara dengan orang tua siswa SA, 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat merumuskan bahwa pendidikan gratis itu dapat membantu anak-anak bangsa dalam mendapatkan hak untuk menuntut ilmu sampai SMA sebagaimana dalam peraturan pemerintah untuk mewajibkannya anak-anak bangsa wajib belajar 12 tahun. Dengan adanya program pendidikan gratis secara tidak langsung tidak ada lagi alasan bagi orang tua tidak menyekolakan anak-anak mereka. Berikut hasil wawancara Kepala Dinas pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Pendidikan gratis untuk masyarakat agar bisa melanjutkan sekolah sampai 12 tahun harus dimanfaatkan masyarakat agar bisa mengurangi beban orangtua dan tidak menjadikan alasan tidak bisa melanjutkan lagi pendidikan kedepannya.”(Hasil wawancara MR, 24 Maret 2017).

b. Program pemerintah wajib belajar 12 tahun

Program wajib belajar dua belas tahun di lingkungan direktorat pembinaan pendidikan, mulai prode 2009 lebih di arahkan untuk menyempurnakan program pementasan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu di seluruh tanah air. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan infrastruktur sekolah dalam hal ini sekolah menengah pertama dilaksanakan dan di prioritaskan berdasarkan pada upaya-upaya pemerataan penyediaan akses pendidikan bagi populasi yang sangat membutuhkan di daerah daerah yang secara spesifik terlayani karena

kepencaran geografis, maupun karena kebutuhan pemenuhan daya tampung di suatu daerah tertentu karenanya lokasi-lokasi sekolah yang dibangun, secara fisik menjadi semakin menjauh, terpencil, dan terpencar-pencar mendekati kantong-kantong dimana potensi siswa tinggal. Berikut hasil wawancara Kepala Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa :

“Program pemerintah untuk masyarakat dalam hal pendidikan gratis sangatlah membantu khususnya masyarakat yang kurang mampu di seluruh tanah air seperti masyarakat untuk di Kepulauan yang jauh dari kota yang sangat butuh pendidikan.”(Hasil wawancara AH, 24 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka program wajib belajar dua belas tahun lebih diarahkan untuk menyempurnakan program pementasan wajib belajar pendidikan dasar yang bernutu diseluruh tanah air. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan infrakstruktur sekolah dalam hal ini sekolah menengah keatas dilaksanakan dan di prioritaskan berdasarkan pada upaya-upaya pemerataan penyediaan akses pendidikan bagi populasi yang sangat membutuhkan di daerah-daerah yang secara spesifik belum terlayani karena terpencaran geografis(*geographical scateredness*),maupu karena kebutuhan pemenuhan daya tampung disuatu daerah tertentu. Karenanya lokasi-lokasi sekolah yang dibangun secara fisik menjadi semakin jauh terpencil, dan terpencar-pencar mendekati kantong-kantong dimana potensi siswa tinggal.

4. *Threats* (Ancaman)

- a. Kurangnya pengawasan yang dapat menyebabkan penyelewengan dana dalam pelaksanaan strategi tersebut

Kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh dinas pendidikan sehingga banyak teman terkait penyelewengan dan penyunatan dana bantuan dalam peningkatan kualitas pendidikan ditingkat sekolah-sekolah di kepulauan kini semakin merajalela dan leenggang kangkung. Pasalnya penyelewengan dana tersebut terjadi bukan hanya didaerah pedesaan terpencil saja melainkan disekolah yang tata letaknya terletak berdampingan dengan kantor cabang dinas pendidikan kecamatan kota, penyelewengan tersebut juga marak terjadi. Penyunatan dana tersebut bahkan terjadi berulang kali dengan motif berbeda dan tanpa kejelasan. Hal tersebut semakin menambah catatan buruk terkait penyimpangan dalam pendistribuan dana tersebut. Berikut hasil wawancara dengan orang tua siswa yang mengatakan bahwa:

“Pemotongan dana tersebut sudah terjadi berulang kali sejak tahap pertama, sampai sekarang tahap ketiga dan keempat dengan nominal dan motif berbeda. Alasan para guru dulu dipotong untuk amal”.(hasil wawancara SA, 24 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mendiskripsikan bahwa kurangnya pengawasan langsung oleh dinas pendidikan sangat mempertahankan dalam pengembangan kualitas mutu pendidikan pada tingkat kepulauan yang notabinenya terpencil dan sulit dijangkau. Seharusnya daerah-daerah yang seperti inilah yang harus di permantap pengawasannya karena peluang untuk menyeleweng sangat mudah dengan ahli pengawasan saja jarang kelokasi.

b. Kurangnya minat guru mengajar di kepulauan

Kurangnya minat guru untuk mengajar di kepulauan maka perlu pemerataan guru atau pendidik disetiap wilayah atau daerah. Senada dengan wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa :

“Kita disini memang sangat kekurangan tenaga pendidik. Namun bagi kami itu tidak jadi penghambat dan tidak pula menyurutkan semangat kami untuk mendidik anak-anak kami. Karena meskipun demikian kita patut bersyukur dengan adanya sekolah ditempat kita ini yang meskipun jauh, tapi anak-anak tidak pernah merasa terbelakang dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Itu adalah satu kesyukuran besar. (Hasil wawancara AH, 24 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka dapat dilihat dari peningkatan pendidikan termasuk peningkatan kualitas siswa. Kurangnya minat guru di tempatkan di kepulauan sangat berefek bagi daya tangkap siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran atau ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, jika dalam suatu sekolah guru harus mengajar lebih dari dua mata pelajaran dan juga tingkat sekolah yang berbeda (SMP dan Pesantren) karena masih berada dalam satu lokasi yang sama disebabkan karena kekurangan tenaga pendidik. Senada dengan penjelasan diatas, berikut hasil wawancara dengan seorang guru yang mengatakan bahwa :

“Hampir semua guru disekolah kami ini memegang dua atau lebih kelas mata pelajaran dalam sehari dan guru yang mengajar di SMP juga mengajar di SMP pesantren. Hanya Bapak Kepala Sekolah yang memegang satu mata pelajaran. (Hasil wawancara FH, 03 April 2017)

Keberhasilan pendidikan dalam suatu sekolah dapat pula diukur dari keberhasilan siswa-siswanya, termasuk kualitas dan prestasi yang dicapai oleh para siswa tersebut. Keseimbangan perbandingan (rasio) antara guru dan siswa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam memudahkan siswa

menangkap dan memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Jika dalam kegiatan proses mengajar, seorang tenaga pendidik harus melayani banyak siswa maka akan mengurangi daya tangkap siswa pada pelajaran yang diberikan dan mengurangi efektifitas pengajaran. Berikut Hasil wawancara Siswa SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa :

“Di sekolah kami masih kekurangan guru pengajar sehingga jika kami ingin belajar harus menunggu guru yang ada di pesantren untuk mengajar kami karena hal itu kami masih jauh tertinggal dibandingkan daerah kota”.
(Hasil wawancara WL, 25 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan pada daerah kepulauan, khususnya didaerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring utara Kabupaten Pangkep masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah daratan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai visi. Misalnya permasalahan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, jumlah guru yang masih minim, kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dan sebagainya. Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Memang di daerah Kepulauan sangat membutuhkan guru pengajar akan tetapi banyak guru pengajar yang tidak menginginkan untuk di tempatkan mengajar di daerah kepulauan alasannya karena kondisi yang sangat jauh jadi banyak para guru yang di tempatkan di kepulauan dalam seminggu biasanya hanya 3-4 hari berada di Pulau.”(Hasil wawancara MR, 25 Maret 2017)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, swasta, masyarakat dan orang tua. Upaya dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan

berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan (RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pangkep).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dikaitkan dengan RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pangkep dalam pemetaan hasil analisis SWOT yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data dan dokumentasi dapat disimpulkan strategi terkait masalah pendidikan di daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep adalah kurangnya pengawasan yang dapat menyebabkan penyelewengan dana dan anggaran dalam pelaksanaan strategi serta rasio guru dan siswa yang sangat rendah.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep yaitu adanya pelatihan (diklat) yang diadakan oleh pemerintah daerah bagi tenaga pendidik yang telah terealisasi dan telah diikuti oleh beberapa tenaga pendidik meskipun baru sedikit yang telah mengikuti kegiatan tersebut, komitmen yang tinggi dari tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut terlihat dari semangat para pengajar yang terus memberikan ilmu pengetahuan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun terdapat banyak kendala dan rintangan. Pembinaan kelas yang masih belum optimal oleh kendala masalah dana.

Adapun kendala yang menjadi kelemahan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring

Utara Kabupaten Pangkep adalah (1) Kondisi geografis yang cukup jauh dari ibukota, namun masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama antara banyak pihak termasuk masyarakat yang membuat perahu yang sampai sekarang bisa digunakan sebagai alat transportasi yang menghubungkan antara daerah kepulauan dan ibu kota Pangkep. (2) tunjangan khusus daerah terpencil tidak efektif yang dikarenakan adanya aturan atau tahap-tahap yang harus dilalui atau dilakukan oleh seseorang guru sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan khusus tersebut, tidak diberikan secara merata bagi tenaga pendidik pada daerah terpencil. Namun, hal demikian dapat diatasi dengan adanya bantuan dana BOS. (3) Sarana pendukung berupa listrik, informasi, transportasi yang terbatas. Hal tersebut dapat pula ditangani dan diakali oleh masyarakat dengan membuat tenaga surya, AKI dan lain-lain. Namun meskipun demikian penggunaan listrik sangat terbatas selain itu, mengenai alat komunikasi dan informasi yang sampai saat ini masih belum tersedia.

C. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Daerah Kepulauan Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

1. Deskripsi Strategi SO (*Strengths Opportunities*) \

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan peluasan pendidikan atau bisa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan peningkatan kualitas nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status social, agama, maupun letak lokasi geografis.

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara agar untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan kualitas. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem pendidikan atau lembaga pendidikan karena minimnya fasilitas yang tersedia. Ada beberapa hal yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan, sebab-sebab tersebut antara lain: keadaan geografis yang heterogen sehingga sangat sulit menjangkau daerah-daerah tertentu.

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Permasalahan sarana dan prasarana yang sering dijumpai pada daerah yang terpencil atau pedalaman. Biasanya keterbatasan sarana dan prasarana ini mulai dari gedung sekolah yang ruangnya tidak layak dipakai untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman dan hanya terdapat dua atau tiga kelas saja, tidak terdapat ruangan lain seperti perpustakaan, laboratorium sarana-sarana belajar seperti buku paket yang up date serta fasilitas lainnya dan jumlah guru yang sangat terbatas.

- a. Membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang merintang berjalannya suatu proses

pendidikan di daerah terpencil. Sarana dan prasarana meliputi gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah atau lembaga tempat belajar. Sering kita lihat pembangunan sekolah megah di perkotaan dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun hal itu akan berbanding terbalik ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya di daerah terpencil. Memang di kepulauan sudah ada fasilitas sarana dan prasarana, namun fasilitas sarana dan prasarana yang belum cukup memadai untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar. Namun upaya pemerintah untuk melengkapi fasilitas tersebut sudah di usahakan walaupun belum secara seutuhnya, dalam waktu sementara ini sudah ada tiga ruangan yang dibangun dan terdapat didalamnya ruangan guru, kelas belajar mengajar.

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Pendukung Pendidikan di Kepulauan Sabutung

No.	Sarana dan Prasarana	Volume	Keterangan
1.	Ruangan kelas	3 ruangan	Fungsi ruangan kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek, yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktek dengan alat khusus yang muvah dihadirkan. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyaknya rombongan belajar. Kepastian maksimum ruang kelas 27 peserta didik
2.	Ruangan guru	1 ruangan	Ruangan guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu

Sumber : SMP Neg 1 Liukang Tupabiring

Hal tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah. Sebuah sekolah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana menurut Menteri Pendidikan

No	Sarana dan prasarana	Volume	Keterangan
1.	Ruang kelas	3 ruangan	Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Banyak minimum ruangan kelas sama dengan banyaknya rombongan belajar. Kapasitas maksimum ruangan kelas 28 peserta didik.
2.	Ruang guru	1 ruangan	Ruangan guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu baik peserta didik maupun tamu lainnya. Rasio minimum luas ruangan guru 4m ² /pendidik dan luas 32 m ² . ruangan guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah serta dekat dengan ruang pimpinan.
3.	Ruang pimpinan	1 ruangan	Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan aktivitas pengelola sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua siswa, unsure komite sekolah, petugas dinas pendidikan atau tamu lainnya.
4.	Ruang	2 ruangan	Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar/membaca atau memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dan sekaligus tempat petugas pengelola perpustakaan
5.	Laboratorium IPA	2 ruangan	Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat pendukung kegiatan dalam bentuk percobaan dengan dilengkapi berbagai alat penunjang dalam praktikum.
6.	Tempat ibadah	1 ruangan	Tempat ibadah merupakan sarana pendukung untuk menanamkan perilaku ketekunan beribadah bagi siswa sejak dini. Tempat ibadah dapat digunakan juga untuk shalat berjamaah oleh siswa, guru dan juga tamu.
7.	Toilet	4 ruangan	Toilet berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran. Minimum terdapat 1 unit toilet untuk sekitar 60 peserta didik pria, 1 unit toilet untuk setiap 50 peserta didik wanita dan 1 unit toilet untuk guru.
8.	Gudang	1 ruangan	Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Peletakan gudang perlu diperhatikan agar tidak mengganggu aktivitas lain dalam bangunan tersebut. Gudang sebaiknya terletak dilokasi yang tidak lembap agar barang tidak gampang rusak. Asal tidak lembap, gudang bisa diletakkan dimana saja. agar tak menghabiskan lahan pada sekolah, gudang bisa diletakkan di bawah tangga atau di toilet.

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Salah satu masalah pendidikan yang dialami pada daerah terpencil dan kepulauan adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, oleh karena itu, upaya yang perlu di perhatikan untuk peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada daerah terpencil kepulauan adalah mengenai pemenuhan sarana dan saran penunjang pendidikan yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Senada dengan penjelasan diatas, berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Secara umum peningkatan kualitas bidang pendidikan tahun 2013-2017 akan diarahkan pada tiga hal utama, yaitu sebagai berikut ; peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidkan, peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, dan penerapan system tata kelola lembaga pendidikan yang baik termasuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pengukuran ketercapaian hasil peningkatan kualitas pendidikan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bidang pendidikan telah di susun program kerja yang terdiri dari 5 (lima) program utama dan 3 (tiga) program penunjang dengan rincian sebagai berikut: *program utama* : program pendidikan usia anak didik(paud), program wajib belajar pendidikan dasar 9(Sembilan) tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal dan informal layanan pendidikan. *Program penunjang*: program administrasi program peningkatan disiplin operatur” (Hasil wawancara, MR 05 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana dan merupakan kelengkapan atau fasilitas yang digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses belajar-mengajar, kurangnya fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kualitas pendidikan itu sendiri. Sehingga tidak heran jika terdapat sekolah-sekolah yang terbelakang. Seperti halnya sekolah didaerah terpencil dan kepulauan yang sangat berbedah jauh dari sekolah-sekolah daratan.

Kesengjangan tersebut sebagian besar dikarenakan oleh beberapa faktor seperti jaraknya yang realitif jauh dan sulitnya di akses serta faktor lainnya seperti fasilitas tenaga listrik.

Hal yang pernah dikatakan oleh (Conyers dan Hill, 1989 dalsm Suharto; 2012) peningkatan kualitas selaras dengan kata *development* yang berasal dari kerja *to develop*, yang artinya menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara pertahap (*to change gradually*) dengan demikian, peningkatan kualitas bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara perencana dan berkesenambungan. Penjelasan tersebut senada dengan hasil wawancara orang tua siswa yang mengatakan bahwa:

“Sekolah-sekolah kita disini memang sangat kekurangan fasilitas-fasilitas. Sehingga, tidak heran tidak jika terdapat perbedaan yang begitu jauh dengan sekolah-sekolah dikota. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu seperti fasilitas ruangan computer dan computernya dan ruangan laboratorium” (Hasil Wawancara, SA 03 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat merumuskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penunjang pendukung kelancaran proses belajar mengajar antara guru dan siswa itu masih sangat minim dikarenakan kurangnya fasilitas-fasilitas berupa alat tulis yang masih menggunakan kapur bahkan belum ada listri sekolah untuk memudahkan para guru dan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar pada musim hujan datang. Pendapat yang sama dikemukakan oleh guru sekolah yang mengatakan bahwa:

“Pada konsep awal, peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita ini memang berbeda dengan peningkatan kualitas sekolah-sekolah diluar sana. Dimana pemerintah membangun pendidikan disini hanya dengan sebuah nama, tanpa memberikan fasilitas sarana dan prasarana”. (Hasil wawancara, FH 04 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa sangat ironis memang jika kita kembali memilih kisah perjalanan peningkatan kualitas sekolah di daerah Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara. Pada dasarnya pemerintah membangun sekolah dengan sebuah nama tanpa fasilitas penunjang. Termasuk tenaga pendidik atau guru maupun tempat belajar. Selanjutnya, Berikut hasil wawancara Kepala Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabiring menambahkan informasi tersebut dengan mengatakan bahwa:

“Pada mulanya saya disini selaku kepala sekolah disekolah menengah pertama (SMP). Namun pada saat pemerintah membangun sekolah menengah atas (SMA) di daerah sini, saya merangkap jabatan sebagai kepala sekolah di SMP dan juga di SMA. Begitupun juga dengan para guru-guru dan juga gedung sekolah yang kita pinjam adalah milik SMP. (Hasil Wawancara, AH 04 April 2017)

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat dirumuskan bahwa meskipun demikian, sekolah-sekolah di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara tersebut yang dulunya dibangun benar-benar dari titik awal, kini sudah dimulai berkembang. Meskipun gedung sekolah setiap mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah menengah atas namun patut kita syukuri bahwa semangat para siswa sebagai penerus bangsa tidak pernah surut. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang orang tua siswa dari hasil wawancara Siswa SMP Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Masalah perbedaan kualitas sekolah kami disini dengan sekolah sekolah viluar sana memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun meskipun bagaimana, ini adalah daerah kami, tanah kelahiran kami yang patut kami banggakan karena siapa lagi yang akan menguji jika bukan kami sendiri. Toh, meskipun dengan keadaan sekolah seperti ini kami juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah didaratan.” (Hasil Wawancara WL 04 April 2017)

Hasil wawancara tersebut, dapat melihat bahwa anak-anak siswa berantusias dalam pengembangan sekolahnya meski tertatih tatih dalam pengembangannya dan para guru berusaha memaksimalkan waktu sekolah agar dapat menyamai sekolah-sekolah yang ada dikota. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala sekolah yang mengatakan bahwa:

“Sekolah kami pernah mengikuti perlombaan antar sekolah se-kecamatan maupun se-kabupaten dan pernah menang baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan pada saat lomba cerdas cermat anak-anak kami masih bisa bersain walau hanya memperoleh juara ke tiga pada acara porseni tingkat kabupaten”(Hasil Wawancara, AH 04 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang dilakukan penulis terkait dengan sarana dan prasarana terlihat tidak sesuai dengan peraturan permediknas No. 24 tahun 2007 nampak terlihat dari segi peningkatan kualitas gedung baru dua gedung yang Nampak terlihat terbangun itupun hanya dijadikan hanya dua ruangan yakni ruangan ruangan belajar dan ruangan guru meski belum dilengkapi dengan prasarana lainna sebagai penunjang dari segi proses belajar mengajarnya, adapun sarana yang dimaksud ialah metode proses belajar mengajar seperti papan tulis masih menggunakan kapur sedangkan sekolah-sekolah di perkotaan sudah memakai spidol, sedangkan ruangan untuk perpustakaan dan labolatoriun belum ada.

b. Memberikan Tunjangan Khusus Guru di daerah terpencil di kepulauan

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk. Faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian faktor yang paling penting adalah adalah guru, karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas memang di pengaruhi oleh mutu gurunya. Guru di kenal sebagai '*hidden curriculum*' atau kurikulum tersembunyi karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi sang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran bagi sebagian orang tua siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagian wakil orang tua ketika anak-anaknya tidak berada dalam keluarga.

Pada era teknologi informasi, guru memang tidak lagi dapat berperan sebagai satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan peran guru telah berubah lebih menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator bagi peserta didik. Dalam era teknologi informasi peserta didik dengan mudah dapat mengakses informasi apa saja yang tersedia melalui internet. Dalam kondisi seperti itu, maka guru diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar untuk memberikan rambu-rambu etika dan moral dalam informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, peran pendidik tidak dapat digantikan oleh apa dan siapa, serta dalam era apa saja. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif dalam proses pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan harus di tingkatkan mutunya dengan scenario yang jelas.

Dalam tulisan artikel, Surya menyatakan dengan tegas bahwa “semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di *front* terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan anggota masyarakat dan warga Negara yang selama ini terabaikan perlu mendapat prioritas dalam reformasi”. Hak utama pendidik yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak bukan ‘upah minimum’. Kebijakan upah minimum boleh jadi telah menyebabkan pegawai bemental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Itulah sebabnya maka langkah pertama peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah memberikan kesejahteraan guru dengan gaji yang layak untuk kehidupannya.

Langka pertama ini dinilai amat vital dan strategis untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan, pertama dari lima syarat pekerjaan dapat disebut sebagai profesi yang masih belum terpenuhi secara sempurna adalah gaji dan kompensasi dari pelaksanaan peran sebagai profesi.

Kelima syarat sebagai profesi adalah:

1. Bahwa pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi bagi masyarakat.
2. Bahwa pekerjaan itu memerlukan bidang keahlian tertentu.
3. Bidang keahlian itu dapat dicapai dengan melalui cabang pendidikan tertentu (*body of knowledge*)

4. Bahwa pekerjaan itu memerlukan organisasi profesi dan adanya kode etik tertentu dan kemudian
5. Bahwa pekerjaan tersebut memerlukan gaji atau kompensasi yang memadai agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara profesional.

Hasil kelima syarat tersebut yang masih belum terpenuhi sepenuhnya adalah syarat yang kelima yakni gaji dan kompensasi yang memadai. Alasan kedua karena peningkatan gaji dan kesejahteraan merupakan langkah yang memiliki dampak yang paling berpengaruh (*multiplier effects*) terhadap langkah lainnya.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang mengatakan:

“Penyaluran tunjangan khusus guru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia. Dalam penyaluran tunjangan tersebut dilakukan secara triwulan dengan mekanisme pemindahan buku dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah, pemerintah daerah melaksanakan pembiayaan atau pencairan kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas umum daerah secara triwulan” (Hasil Wawancara, MR 05 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penyaluran tunjangan khusus guru disalurkan secara triwulan ini tidak dapat langsung diterima oleh para guru dikarenakan kondisi geografis yang lumayan jauh. Hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan pendidikan karena tidak bisa dipungkiri dengan ketidakpuasan para guru dapat mendorong untuk bermalas-malasan dengan lebih mengutamakan pekerjaan lain atau mencari tempat yang dianggap dapat menjamin bagi diri sendiri senada dengan hasil wawancara penulis dengan Seorang Orang tua Siswa yang mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa strategi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah pemberian tunjangan bagi guru baik tunjangan kinerja, tunjangan kesejahteraan maupun tunjangan daerah terpencil” (Hasil Wawancara FH 05 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pemberian tunjangan khusus bagi tenaga pengajar memang perlu ditingkatkan sesuai dengan kapasitas dan kualitas guru tersebut. Namun, sangat memperhatikan apabila tenaga pendidik dari daerah terpencil pula kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam peningkatan tunjangan. Dengan adanya tunjangan khusus guru terpencil yang disalurkan secara triwulan ini tidak dapat langsung diterima oleh para guru dikarenakan kondisi geografis yang jauh. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam hal proses belajar mengajar karna disetiap penerima tunjangan tersebut guru yang mendapat tunjangan khusus ke kota untuk menerima tunjangannya yang menempuh seharian untuk kembali lagi ke sekolah.

Berikut tabel besaran tunjangan yang diterima oleh tiap-tiap guru baik guru honorer maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil) di sekolah SMP Negeri Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep.

Tabel 1.6 Besaran tunjangan yang diterima oleh tiap guru

No	Nama	Pegawai/ guru SMP Neg 1 Liukang Tupabiring Utara		Tunjangan/ bulan	Keterangan
		Honorer	PNS		
1.	Abd. Hayyi, S.Pd, S.H		✓	<u>Rp. 300.000</u>	Fungsional
2.	Haedar, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
3.	Nurjannah.B, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
4.	Faisal Hamja, S.Pd		✓	<u>Rp. 300.000</u>	Fungsional
5.	Hamsi, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
6.	Musakkir, S.Pd. I	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
7.	ST. Haliya, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
8.	Lisnawati, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
9.	Abd. Wahid, S.Pd	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
10.	<u>Fajri</u>	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos
11.	<u>Kasman</u>	✓		<u>Rp. 200.000</u>	Dana Bos

Sumber Data : Data Skunder 05 April 2017

Berdasarkan tabel diatas bahwa besaran penerimaan antara guru honorer dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berbanding tidak lurus dimana yang seharusnya menerima tunjangan fungsional adalah guru karena merekalah yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar berikut hasil wawancara dengan salah satu Siswa yang mengatakan bahwa:

“Informasi yang saya dengar itu belum ada tunjangan daerah, adapun tunjangan dari pemerintah pusat berupa dana BOS yang diatur oleh kepala sekolah. Namun ada jaminan dari kepala sekolah(tanggung jawab kepala sekolah)”. (Hasil Wawancara, WL 06 April 2017)

Informasi tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Liukang Tupabiring Utara yang mengataka bahwa

“Imbalan atau gaji guru honorer sebenarnya berasal dari dana BOS serta usaha-usaha dari kita sendiri. Bantuan dana BOS tersebut diarahkan kepada pengadaan buku penduan siswa dan juga jaminan dan tunjangan untuk guru-guru honore”. (Hasil wawancara, AH 06 April 2017)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemberian tunjangan hanya diperuntukan khusus guru PNS kecamatan Liukang Tupabiring di SMP semetara guru PNS itu sebenarnya tidak bisa memaksimalkannya. Karena, tanggung jawab mengajar itu tidak sesuai dengan standar waktu yang sebenarnya malahan justru aktif diluar dari pada jam mengajar itu terganggu. Disebabkan bagi para PNS (guru) disibukan oleh kegiatan-kegiatan yang lain seperti: menemui keluarga yang dikota, menerima gaji pokok dan lain-lainnya sementara, ketidak hal ini dibenturkan dengan tanggung jawab disekolah itu lebih banyak tanggung jawabnya para tenaga kerja (guru) honorer mestinya inilah yang patut pula diberdayakan tanggung jawab mereka yang melakukan aktivitas tidak lepas dari tanggung jawabnya sesuai standar waktu yang ditentukan disekolah. Berikut Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Tunjangan fungsional diterima masing-masing guru sebesar Rp300 ribu per bulannya atau Rp 3.600.000 selama setahun, pemberian kouta ini dilakukan berdasarkan jumlah guru disetiap daerah“pembayaran ini berdasarkan SK(Surat Keputusan) Kemendikbud untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran tunjangan kepada guru yang telah terdaftar sebagai penerima tunjangan”. (Hasil wawancara, MR 06 April 2017)

Namun sangat dilematis karena terkadang ada guru yang berhak mendapatkan tunjangan terpaksa tidak terdafar sebagai penerima tunjangan karena kouta terbatas. Dalam prosesnya bisa saja ada guru yang layak di verifikasi tak mencapai kouta, namun sisanya dibagikan di daerah yang jumlah gurunya terbanyak. Berikut hasil wawancara dengan Guru tenaga pendidik yang mengatakan bahwa:

“Pengadaan tunjangan-tunjangan tersebut memang sudah lama. Namun, kelemahannya ada beberapa tahap atau persyaratan yang harus dipenuhi

untuk mendapatkan tunjangan tersebut. Tidak diberikan secara merata, dalam artian sama guru disekolah mendapatkan tunjangan namun ada tahap-tahap yang harus dilalui sehingga agak sulit bagi kita di daerah terpencil karena terbatasnya kelas dan jumlah siswa sehingga sangat minim guru yang mendapatkan tunjangan tersebut”. (Hasil Wawancara FH, 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa penghasilan berupa gaji bagi tenaga pendidik di daerah kepulauan memang sangat minim terlebih lagi bagi tenaga honorer yang mengabdikan diri di daerah kepulauan yang hanya mendapatkan imbalan seadanya saja dari sekolah itu sendiri. Hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan pendidikan karena tidak bisa dipungkiri dengan ketidakpuasan para guru dapat mendorong mereka untuk bermalas-malasan dan lebih mengutamakan pekerjaan yang lain atau mencari tempat yang dianggap dapat menjamin bagi diri mereka. Padahal kehadiran tenaga honorer sangat membantu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar karena sangat kurangnya tenaga pendidik, bahkan hampir semua guru di daerah kepulauan Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring merangkap jabatan atau memegang beberapa kelas dalam satu hari.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemberian tunjangan hanya diperuntukan khusus guru PNS itu sebenarnya tidak bisa memaksimalkan. Karena, tanggung jawab mengajarnya tidak sesuai dengan standar waktu yang sebenarnya. Malah justru aktivitas diluar dari pada jam mengajar itu terganggu disebabkan bagi para PNS (guru) disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain seperti: menemui keluarga yang dikota, menerima gaji pokok dan lain-lainnya sementara, ketiak hal ini dibenturkan dengan

tanggung jawab disekolah itu lebih banyak tanggung jawabnya para tenaga kerja (guru) honorer mestinya inilah yang patut pula diberdayakan tanggung jawab mereka yang melakukan aktivitas tidak lepas dari tanggung jawabnya sesuai standar waktu yang ditentukan disekolah.

c. Pelatihan (fleksibel, artinya diklat) bagi tenaga pengajar

Komptensi atau kualitas harus di tekan demi berjalannya pendidikan itu sendiri, tugas guru adalah merangsang kreativitas dari memberikan pengajaran secara fleksibel, artinya berkedudukan seperti siswa yang belajar tidak ada patron client. Peningkatan mutu bukan hanya pada intelektual guru saja, melainkan juga mengembangkan psikologi guru itu sendiri misalnya dengan memahami karakteristik siswa, psikologi perkembangan dan sebagainya. Dengan adanya peningkatan itu tentu akan berdampak pada membaiknya output pendidikan. Dikarenakan guru dapat menempelkan dirinya sebagaimana mestinya dan bersifat fleksibel, artinya berkedudukan seperti siswa yang belajar tidak ada patron cliend peningkatan mutu bukan hanya pada intelaktual guru saja, melainkan juga mengembangkan fisikologis guru itu sendiri misalnya dengan memahami karakteristik siswa, fisikologis perkembangan dan sebagainya dengan adanya peningkatan ini tentunya akan berdampak pada membaiknya output pendidikan. Dikarenakan guru dapat menempatkan dirinya sebagaimana mestinya dan bersifat fleksibel. Kenakalan remaja biasanya terjadi justru karena prilaku guru itu sendiri misalnya melakukan hukuman fisik kepada siswa ataupun penekanan psikologis. Peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru) dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan berupa diklat.

Tabel 1.7 Nama-nama tenaga pendidik yang pernah ikut pelatihan diklat disekolah SMP NEG 1 Liukang Tupabiring Utara.

NO.	Nama	Jenis diklat
1.	Abd. Hayyi, S.Pd, S.H	Seminar
2.	Hamsi, S.Pd.I	Seminar
3.	Musakkir, S.Pd	Lokakarya
4.	Lisnawati, S.Pd	Lokakarya
5.	ST. Halija, S.Pd	Seminar
6.	Faisal Hamja, SP. d	Lokakarya

Sumber data : data sekunder 06 April 2017

Upaya untuk mencapai peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru sebagai tenaga kependidikan, maka profesi guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dan proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat kaitnya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Berikut hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan, tapi belum semua adapun pelatihan yang kami ikuti ialah seminar dan lokakarya, adapun manfaat dalam mengikuti pelatihan tersebut adalah peningkatan keahlian kerja, pengurangan keterlambatan kerja, peningkatan dalam rasa tanggung jawab.”(Hasil wawancara, MR 03 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendidikan dan pelatihan diklat sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi tenaga pengajar dalam upaya peningkatan kualitasnya karena dalam menyalurkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru dibutuhkan juga berbagai pengalaman dan

keterampilan seorang pengajar sehingga dalam proses pengajaran para siswa juga mampu menyerap dan memahami dengan mudah dan cepat. Dengan adanya seminar dan lokakarya yang di ikuti para tenaga pendidik berungsi untuk pengembangan kerja, tanggung jawab, tata pengaturan kerja, dan pengambilan keputusan dalam kerja.

Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat. Secara umum terdapat beberapa langka strategi yang dapat di implementasikan dalam meningkatkan kualitas pegawai termasuk tenaga pendidik salah satunya adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bentuk stategi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan guru adalah pengadaan pendidikan dan pelatikan yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dari berbagai daerah, seperti halnya para guru di kepulauan Sabutung Kecamatan Liukang Tuapbiring Utara Kabupaten Pangkep yang mengikutkan para pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan (diklat). Berikut wawancara kepala sekolah salah satu sekolah menengah pertama (SMP) Liukang Tupabiring utara yang mengatakan bahwa:

“Pendidikan dan pelatihan itu memang sudah ada kemari itu kami sempat mengikutkan beberapa guru. Namun masih ada beberapa guru yang belum mengikuti pelatihan tersebut. Karena pada saat ada pelatihan hanya guru-guru yang kebetulan ke kabupaten kota untuk menerima gajinya itulah yang kami ikutkan dalam pelatihan tersebut karena kalau kita hadirkan juga guru-guru yang smentara ada di pulau mengajar itu

sulit untuk hadir di karenakan sulit komunikasi dan transportasi”. (Hasil wawancara AH, 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilapangan, terdapat suatu kekeliruan bagi pemerintah atau pihak terkait yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Sehingga, hanya sebagian kecil guru yang berasal dari daerah terpencil kepulauan yang bisa mengikuti diklat tersebut karena pada dasarnya para guru-guru yang ada di daerah terpencil dan kepulauan khususnya di daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring utara yang di dominasikan oleh para guru honorer. Senada dengan penjelasan tersebut berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang Guru di Kecamatan Liukang Tupabiring yang mengatakan bahwa:

“Belum ada pelatihan khusus bagi guru honor dan hanya sebagian guru di sekolah tempat saya mengajar yang telah mengikuti diklat, sementara yang menghidupkan sekolah di pulau kita ini adalah teman-teman seangkatannya saya (guru honorer) (Hasil wawancara, FH 06 April 2017)

Penyampaian juga sangat berpengaruh. Dalam hal ini peningkatan kualitas guru dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Dengan demikian kualitas dan prestasi siswa juga dapat meningkat dan memiliki daya saing dalam berkompetensi dengan siswa dari sekolah-sekolah lain. Berikut hasil wawancara Siswa SMp Neg 1 Liukang Tupabiring yang mengatakan:

“Untuk Pelatihan diklat agar semua guru maupun guru honorer harus mengikuti sehingga para guru lebih baik di dalam mengajar jadi kami sebagai siswa bias lebih memahami para guru di dalam mengajar.”(Hasil wawancara WL, 03 April 2017).

2. Deskripsi Strategi WO (*Weakness Opportunities*)

- a. Kondisi geografis yang kurang memadai bisa diatasi dengan program pemerintah dalam peningkatan pendidikan

Dalam upaya meningkatkan proses pendidikan di tanah air dan menyambut berkembangnya teknologi global di abad milenium ini, dalam melakukan ilmu banyak sarana yang dapat digunakan seperti dengan kondisi kepulauan yang jauh dari kabupaten maka dalam proses diantara sarana dan prasarana pendukung pendidikan membutuhkan transportasi berupa kapal motor. Untuk mewujudkan peningkatan pendidikan yang merata diseluruh tanah air tercinta. salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan peningkatan pendidikan diseluruh tanah air maka pemerintah mewujudkan peraturan pendidikan gratis dan maka terwujudnya peraturan pemerintah wajib 12 tahun.

“Walau letak geografis sekolah kami jauh dari ibu kota yang jarang diperhatikan seperti sekolah-sekolah yang ada di daratan kami sebagai siswa berusaha belajar dengan giat dengan adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun” (Hasil wawancara, WL 06 April 2017)

Dengan hasil wawancara diatas penulis dapat mendeskripsikan bahwa antusias anak-anak kepulauan dalam menuntut ilmu sangat semangat dengan adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang di sertai dengan program pendidikan gratis. Berikut Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Semoga dengan kondisi sekolah yang jauh tidak membuat para siswa lebih malas mereka harus lebih semangat karena dengan adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun.”(Hasil wawancara MR, 06 April 2017).

- b. Program pendidikan gratis menjadi sebuah solusi terhadap masalah keterbatasan dana

Program pendidikan gratis ini pada awalnya pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah No.10 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten yakni gerakan membangun menuju masyarakat maju dan mandiri dengan merumuskan layanan pendidikan gratis yang semakin dimantapkan.

Dengan adanya program pendidikan gratis dapat mengatasi dana terbatas dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga Negara sebagaimana yang diterapkan masyarakat, orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan gratis. Masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar khususnya dalam menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun menuju penuntasan pendidikan pendidikan 12 tahun pada tingkat pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajarannya, kompetensi, iuran pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Berikut hasil wawancara Orang tua siswa yang mengatakan bahwa:

“Setelah adanya pendidikan gratis anak kami bisa melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA sekolah menengah atas, program pendidikan ini sangat bermanfaat anak-anak kami dan khususnya kami sebagai orang tua karena dapat mengurangi beban biaya kami sehari-hari”. (Hasil Wawancara SA 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat merumuskan bahwa pendidikan gratis itu dapat membantu anak-anak bangsa dalam mendapatkan hak

untuk menuntuk ilmu sampai tingkat SMA sebagaimana dalam peraturan pemerintah untuk mewajibkannya anak-anak bangsa wajib belajar 12 tahun dengan adanya program pendidikan gratis secara tidak langsung tidak ada lagi alasan bagi orang tua tidak menyekolakan anak-anaknya.

3. Deskripsi Strategi ST (*Strength Threats*)

- a. Kebijakan pemerintah dalam menegaskan pelayanan pemerintah untuk lebih baik

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini sangat baik dalam hal peningkatan pendidikan anak-anak usia sekolah sehingga tingkat buta huruf atau tidak bersekolah dapat berkurang program pendidikan gratis ini pada awal pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten yakni gerakan membangun menuju masyarakat maju dan mandiri dengan merumuskan layanan pendidikan gratis yang semakin dimantapkan. Berikut Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang kami lakukan dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan dalam pengembangan program pendidikan gratis sudah berjalan dari tahun-ketahun bahkan sampai hari ini. Bahkan mulai hari ini dan sampain sekarang kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Pangkep memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi peserta didik untuk semua jenjang pendidikan mulai dari paket A setara dengan Sd (sekolah dasar) sampai paket C setara dengan SMA (sekolah Menengah Atas)”.(Hasil wawancara MR 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mendiskripsikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam

mengupayakan bagi anak-anak bangsa untuk mencapai pendidikan wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi melalui pendidikan gratis akan tetap dalam penerapannya sampai dikepulauan masih banyak hambatan dikarenakan kondisi geografisnya lumayan jauh dari kabupaten kota sehingga kebijakan ini tersentu dengan cara tidak sempurna yang dirumuskan oleh pemerintah kabupaten kota.

b. Keseimbangan Rasio guru dan siswa.

Pemerataan rasio siswa per guru adalah keseimbangan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Pemerataan penyebaran guru dalam suatu wilayah atau daerah akan berdampak pada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.

Tabel 1.8 Rasio Guru dan Siswa

No.	Desa/kelurahan	Rasio siswa per kelas		
		SD	SMP	SMA
1.	P. Kalambing	29.75	-	-
2.	P. Samatellu	20.50	15.06	-
3.	P. Sabutung	22.28	10.25	-
4.	P. Saugi	21.47	-	-

Sumber DIKNAS Kecamatan Pangkep

Sesuai dengan hasil rasio guru dan siswa yang disajikan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMP Neg 1 Liukang Tupabirig Utara yang mengatakan bahwa:

“Kita disini memang sangat kekurangan tenaga pendidik. Namun, bagi kami itu tidak jadi penghambat dan tidak pula menyurutkan semangat kami untuk mendidik anak-anak kami. Karena meskipun demikian kitapatut bersyukur dengan adanya sekolah ditempat kita ini meskipun jauh dan terpencil, tapi anak-anak tetap merasa terbelakang dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menungtut ilmu. Itu adalah satu kesyukuran besar” (Hasil Wawancara, AH 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan dilapangan maka dapat dilihat dari keseimbangan rasio guru dan siswa dalam peningkatan pendidikan termasuk peningkatan kualitas siswa yang diajar mampu memberikan efek bagi daya tangkap siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran atau ilmu pengetahuan terlebih lagi, jika dalam suatu sekolah seorang guru harus mengajar lebih dari dua mata pelajaran dan juga mengajar di dua tingkat sekolah yang berbeda (SMP dan Pesantren) karena masih berada dalam satu lokasi yang sama dan disebabkan karena kekurangan tenaga pendidik.

Senada dengan penjelasan diatas berikut hasil wawancara penulis dengan seorang guru yang mengatakan bahwa:

“Hampir semua guru disekolah kami ini memegang dua atau lebih kelas mata pelajaran dalam sehari dan guru yang mengajar di SMP juga mengajar di SMP Pesantren. Hanya Bapak Kepala Sekolah yang memegang satu mata pelajaran. (Hasil wawancara FH 06 April 2017)

Keberhasilan pendidikan dalam suatu sekolah dapat pula diukur dari keberhasilan siswa-siswanya termasuk kualitas dan prestasi yang dicapai oleh para siswa tersebut. Keseimbangan perbandingan (rasio) antara guru dan siswa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam memudahkan siswa menangkap dan memudahkan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Jika dalam kegiatan proses belajar mengajar, seorang tenaga pendidik harus melayani

banyak siswa maka akan mengurangi daya tangkap siswa pada pelajaran yang diberikan dan mengurangi efektivitas pengajaran.

4. Deskripsi Strategi WT (*Weaknesse Threats*)

a. Memperbaiki tingkat pelayanan dan SDM guru-guru dikepulauan

Adapun tantangan-tantangan yang perlu disikapi dengan mewujudkan pelayanan mutu SDM pendidikan dalam praktek peningkatan kualitas pendidikan pada daerah kepulauan khususnya kepulauan Sabutung yang dimana yang menjadi ibu kota Kecamatan Liukang Tupabiring Utara dengan melalui standar profesi pendidikan sebagai dukungan dengan mewujudkan program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang disertai dengan program pendidikan gratis. Dengan demikian akan terwujud standar profesi yang tinggi dalam pelayanan SDM pendidikan.

“Pada kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari berbagai instansi pemerintah baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan SDM pendidikan yang masih kurang disekolah kami ini, khususnya instansi pemerintah daerah yang terkelut dibidang Dinas Pendidikan agar senantiasa memperhatikan dan memikirkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas sekolah kami”.(Hasil Wawancara AH 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengatakan bahwa SDM pendidikan dikepulauan khususnya Pulau Sabutung Kecamatan LIukang Tupabiring masih sangat minim karena kondisi geografis jugalah yang menyebabkan rendahnya SDM dikepulauan tersebut sehingga dalam pengembangan mutu kualitas pendidikan tidak berjalan lancar. Hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan pendidikan karena tidak bisa di pungkiri dengan

kondisi geografis yang jauh dari ibu kota Kabupaten sehingga dapat menyebabkan pengembangan SDM pendidikan di tingkat kepulauan terhambat.

- b. Mengefektifkan penyaluran prasarana dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu

Dalam mengefektifkan penyaluran prasarana maka di perlukan ekstensi organisasi baik berupa organisasi produk maupu jasa agar dapat di tentukan kualitas pelayanannya. Konsep layanan, dapat di katagorikan atas layanan internal dan eksternal. Layanan internal adalah layanan yang diberikan personil organisasi kepada porsonil yang lainnya, seperti : siswa dilayani oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar dan guru memberikan dalam kegiatan memberikan gaji sedangkan eksternal adalah layanan yang diberikan kepada personil organisasi kepada nonporsonil organisasi. Prasarana adalah perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung sangat menunjang proses pendidikan.

“Kita disini memang sangat kekurangan tenaga pendidik. Namun, bagi kami itu tidak jadi penghambat dan tidak pula menyurutkan semangat kami untuk mendidik anak-anak kami. Karena meskipun demikian kita patut bersyukur dengan adanya sekolah ditempat kita ini yang meskipun jauh dan terpencil tapi anak-anak tidak merasa terbelakang dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Itu adalah salah satu kesyukuran besar.”(Hasil wawancara, MR 06 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan, maka dapat dilihat dari keseimbangan rasio guru dan siswa berperan peningkatan pendidikan termasuk peningkatan kualitas siswa. Rasio atau perbandingan antara banyak jumlah tenaga pendidik dengan siswa yang diajar mampu memberikan efek bagi daya tangkap siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran atau ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, jika dalam suatu sekolah seorang guru harus mengajar

lebih dari dua mata pelajaran dan juga mengajar di dua tingkat sekolah yang berbeda (SMP dan Pesantren) karena masih berada dalam satu lokasi yang sama dan disebabkan karena kekurangan tenaga pendidik.

“Hampir semua guru disekolah kami ini memegang dua atau lebih kelas mata pelajaran dalam sehari dan guru yang mengajar di SMP juga mengajar di SMP pesantren. Hanya Bapak Kepala Sekolah yang memegang satu mata pelajaran”. (Hasil Wawancara, AH 06 April 2017)

Keberhasilan pendidikan dalam suatu sekolah dapat pula diukur dari keberhasilan siswa-siswanya, termasuk kualitas dan prestasi prestasi yang dicapai oleh para siswa tersebut. Keseimbangan perbandingan (rasio) antara guru dan siswa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam memudahkan siswa menangkap dan memudahkan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Jika dalam kegiatan proses belajar mengajar, seorang tenaga pendidik harus melayani banyak siswa maka akan mengurangi daya tangkap siswa pada pelajaran yang diberikan dan mengurangi efektivitas pengajaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan pada daerah kepulauan Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan di daerah daratan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber daya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, swasta, masyarakat, dan orang tua. Berdasarkan hasil penulis dengan informan dilapangan yang berkaitan dengan RPJMd 2011-2016 Kabupaten Pangkep dalam pemetaan hasil analisis SWOT yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu: pengumpulan data, analisis data, dan

dokumentasi dapat disimpulkan strategi terkait masalah pendidikan di daerah kepulauan Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep adalah kurangnya pengawasan yang dapat menyebabkan penyelewengan dana dan anggaran dalam pelaksanaan strategi serta rasio guru dan siswa yang sangat rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara Kabupaten Pangkep mengenai Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan disektor pendidikan pada daerah Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan berdasarkan dari hasil penelitian antara lain:

1. Strategi Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan pada daerah Pulau Sabutung, meyimpulkan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang merintanginya berjalannya suatu proses pendidikan dan juga yang masalah tunjangan khusus hanya diperuntukan untuk PNS saja. Jadi di perlukan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten dalam mengupayakan strategi tersebut, sehingga strategi pemerintah dapat tersentuh dengan cara sempurna
2. Pemerataan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam peningkatan kualitas pendidikan

Bagaimana pencapaian peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga kependidikan dari itu kelemahan ini melihat letak geografis Kecamatan Liukang Tupabiring Utara yang lumayan jauh dari ibu kota Kabupaten maka proses penyaluran bantuan dana tidak cepat tersalurka dan Masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan

pendidikan yang layak dan relevan dan bermutu sehingga dari peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yaitu Kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh dinas pendidikan sehingga banyak penyelewengan dan penyunatan dana bantuan dan juga kurangnya minat guru mengajar dikepulauan,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara mengenai Strategi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi guru-guru terlebih masalah tunjangan khusus guru yang masih jauh dari harapan.
2. Pemerintah daerah harus lebih mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana yang belum maksimal.
3. Pemerintah daerah juga harus lebih meningkatkan pelatihan untuk para guru dan pemerataan rasio guru dan siswa yang belum sesuai standar peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Afid.2014. Analisis SWOT pendidikan. (online)
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/02/05/analisis- swot-dalam-pendidikan-3/>
- David, Fred R. 2006. Manajemen strategis konsep. Jakarta : Salemba Empat
- Fitri, Maya. 2014. *Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan* (online)
http://www.kompasiana.com/mayafitri/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-pendidikan-masa-kini_54f990daa33311cd568b4571
- Gadjong, Agussalim. 2007. *Pemerintah daerah*. Bogor; Ghalia Indonesia
- Gunawan, Imam.2012. *Kualitas Pelayanan Pendidikan* (online)
<http://masimamgun.blogspot.co.id/2012/11/kualitas-pelayanan-pendidikan.html> (dikutip 28 maret 2016)
- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kotler,Philip.2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta.
- Moenir, HAS.2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi V
- Napitupulu, Paimin.2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfiction*. Bandung: PT. Alumni.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*.Jakarta Prenada Media.
- Sinambela, Lijan Poltak et.al.2006.*Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., dan Gilbert, D.R. 2001.*Management* Edisi ke-13. New Jersey : Prentice Hall
- Suharto, 2012. *Peningkatan kualitas* : Jakarta Bumi Aksara
- Suryadi,Ace. 2008. *Kualitas pendidikan*. Prenada Media.
- Salusu, J. 2002 .*Pengambilan Keputusan strategik Untuk Oraginsasi publik dan Organisasi non profit*. Jakarta: Grasindo
- Sugiono,2011. *Metode Penelitian Pendidikan* (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&d) Bandung. Alfabeta

Tarigan, Rabinson. 2012. *Perencanaan Peningkatan Kualitas wilayah*. Jakarta Bumi Aksara

Tjiptono, Fandy. 2002. *Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama. Andi Ofse. Yogyakarta.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

UU No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan

UU No. 180 Tahun 2009 tentang Surat Keputusan Bupati Pangkep

Wisistiono, sadu. 2003. *Kapitaselektta Pemerintah daerah*. Bandung. Fokus media

Yulianto, Adi Joko. 2011. *Kualitas Pendidikan* (online)

